

The Effectiveness of the Youth Information Counseling Center (PIK-R) Program to Minimize Early Marriage in Sidoarjo Regency [Efektivitas Program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Untuk Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini Di Kabupaten Sidoarjo]

Khoirun Nisa¹, Ahmad Riyadh^{*,2)}

^{1,2)}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: riyadh_ub@umsida.ac.id

Abstract. *The Youth Information and Counseling Center (PIK-R) program aims to reduce the number of early marriages in Sidoarjo Regency. The approach used is a descriptive qualitative method, with data collection through observation, interviews, and documentation. This study is based on five indicators of effectiveness, namely Right Policy, Right Implementer, Right Target, Right Environment, and Right Process. The results of the study showed that several indicators in the PIK-R program were still not optimal. This is due to the lack of understanding of the program by adolescents and their low level of involvement. The socialization carried out in Sidoarjo Regency ranged from 2 to 4 times a year, but the presence of participants who were not entirely voluntary was an obstacle in achieving the main goal of the program, namely reducing the number of early marriages. In conclusion, although the PIK-R program has great potential, its effectiveness still needs to be improved by increasing socialization activities and encouraging the active involvement of adolescents.*

Keywords - Effectiveness; PIK-R; Early Marriage

Abstrak. *Program Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) bertujuan untuk menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan yang diterapkan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini didasarkan pada lima indikator efektivitas, yaitu Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksana, Tepat Target, Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses. Hasil penelitian menunjukkan beberapa indikator pada program PIK-R masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman remaja terhadap program serta rendahnya tingkat keterlibatan mereka. Sosialisasi yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo berkisar antara 2 hingga 4 kali dalam setahun, namun kehadiran peserta yang tidak sepenuhnya sukarela menjadi kendala dalam mencapai tujuan utama program, yakni menekan angka pernikahan dini. Sebagai kesimpulan, meskipun program PIK-R memiliki potensi besar, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi dan mendorong keterlibatan aktif para remaja*

Kata Kunci – Efektivitas; Program PIK-R; Pernikahan Dini

I. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah momen sakral yang dilakukan sekali seumur hidup oleh pasangan yang saling mencintai. Umumnya, pernikahan dilaksanakan oleh individu yang siap lahir dan batin untuk membentuk generasi yang lebih baik. Selain itu, pernikahan juga menjadi sarana menyalurkan keinginan biologis secara halal dan menghindari perbuatan zina. (Aldy Wijayanto, 2019).

Berdasarkan KBBI, masa remaja mengacu pada periode umur dalam kisaran 12 hingga 18 tahun (HIBRIYAH, 2019). Remaja adalah tahap transisi dari masa anak-anak menuju kedewasaan. Dapat dikenali melalui pertumbuhan tubuh yang cepat dan belum mencapai kematangan jiwa. Pada masa remaja, manusia mengalami peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan, disertai berbagai perubahan pada tubuh yang mulai tampak (Saputro, 2018), Perkembangan fisik remaja ditandai dengan perubahan tubuh dan ketertarikan pada lawan jenis. Mereka rentan terhadap perilaku berisiko seperti rokok, narkoba, seks tidak aman, dan pernikahan dini. Di Indonesia, pernikahan sebelum usia 19 tahun masih tinggi. Risiko IMS, HIV, dan AIDS memerlukan perhatian dari pemerintah, LSM, masyarakat, dan keluarga untuk menjaga kualitas generasi mendatang. (Liana, 2018).

. Di Indonesia, Pedoman terkait pengajuan dan putusan dispensasi pernikahan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Aturan ini merupakan ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. (Muhammad Jodi Setianto, 2022) , yang mengubah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 7 ayat (1), menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.

Selain itu, ketentuan mengenai perkawinan pada usia muda tercantum dalam Pasal 26 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Regulasi ini mengatur kewajiban orang tua untuk membimbing, mengurus, mengajarkan, dan menjaga anak."(Yuliani Catur Rini, 2022).

Menurut data UNICEF menjelang pengujung tahun 2022 mengenai kasus pernikahan dibawah umur, Negara Indonesia berada di urutan ke-delapan secara global serta menduduki tempat kedua di wilayah Asia Tenggara. Dengan jumlah kasus yang mendekati 1,5 juta (Andi Dadi Mashuri Makmur, 2024). Berdasarkan laporan UNICEF akhir Pada tahun Pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat keempat dunia terkait kasus perkawinan anak, dengan jumlah kasus total mencapai 25,53 juta (Amirah Syuaib, 2024).

Berdasarkan data BPS 2022, sebanyak 33,76% pemuda di Indonesia melangsungkan pernikahan pertama pada usia 19–21 tahun, 27,07% di usia 22–24 tahun, dan 19,24% pada rentang usia 16–18 tahun. Jika dilihat lebih detail, 30,52% pemuda laki-laki menikah pada usia 25–30 tahun, sedangkan 37,27% pemuda perempuan menikah saat berusia 19–21 tahun, dan 26,48% pada usia 16–18 tahun. Tingginya jumlah pernikahan usia muda menjadi persoalan yang dapat menghambat kemajuan bangsa. (R. Slamet Santoso, 2019).

Pada 2022-2023, Jawa Timur mencatat angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia, mencapai 10,44%, melebihi Angka tersebut melampaui rata-rata nasional. Selain itu, provinsi ini juga mencatat banyaknya pengajuan dispensasi. Perkawinan anak terbanyak, yakni 15.337 kasus (29,9%). Fenomena ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan keterbatasan pendidikan, yang mendorong keluarga memilih pernikahan dini sebagai solusi. (Inas, 2023).

Kabupaten Sidoarjo menempati posisi ke-25 dalam kasus pernikahan usia dini di Jawa Timur berdasarkan data tahun 2022 hingga awal 2023. Dari total 262 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo, sekitar 5% ditolak atau dicabut karena tidak memenuhi syarat atau tanpa persetujuan orang tua. Sekitar 70% pengajuan dipicu oleh kehamilan di luar nikah, sementara alasan lainnya meliputi sudah melahirkan, kesulitan ekonomi, dan faktor lain. Sebagian besar pemohon adalah remaja perempuan (Jatimtimes.com, 2023). Dispensasi pernikahan diberikan kepada calon pengantin yang usianya di bawah 19 tahun. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2, permohonan dapat diajukan oleh orang tua ke pengadilan agama dengan alasan yang mendesak dan disertai bukti yang kuat.

Tabel 1:
Total Permohonan Izin Pernikahan di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo Periode
2019-2023

No	Tahun	Total Permohonan Izin Pernikahan
1.	2019	99
2.	2020	331
3.	2021	287
4.	2022	246
5.	2023	208

Sumber: (SIPP) di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo tahun 2023.

Pengajuan izin menikah di Pengadilan Agama.Sidoarjo meningkat drastis dari 99 kasus pada 2019 menjadi 331 pada 2020, lalu menurun bertahap hingga 208 pada 2023. Sekitar 70% pengajuan karena kehamilan, sementara 30% lainnya akibat alasan mendesak. Pemerintah Sidoarjo menyoroti pernikahan dini karena dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, dan budaya. Hal serupa juga dikemukakan dalam penelitian Beteq Sardi (2016), yang menyatakan Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini mencakup aspek ekonomi, tingkat pendidikan, serta pengaruh dari Masyarakat yang lebih tua dan norma-norma lama yang masih diterapkan dalam kehidupan warga. (Sardi, 2016). Program Genre (Generasi Berencana) diluncurkan BKKBN pada 1993 untuk membantu remaja menunda usia pernikahan dan merencanakan pendidikan, karier, serta rumah tangga. Program ini dijalankan melalui PIK-R untuk Remaja berusia 10–24 tahun yang belum menikah serta kelompok BKR yang ditujukan bagi para orang tua. Guna meningkatkan ketahanan keluarga. (War'iah, 2024). Program PIK Remaja dikembangkan melalui sektor pendidikan dan sosial, mencakup sekolah, universitas, pesantren, serta organisasi pemuda. Pada 2022-2023, terdapat 12.268 kelompok PIK-R dengan 400+ cabang di 34 provinsi. Di Sidoarjo, DP3AKB membimbing PIK-R melalui Program Generasi Berencana, sesuai UU No. 52 Tahun 2009 Pasal 48 Ayat 1 (b) menegaskan pentingnya peningkatan kualitas generasi muda melalui kemudahan memperoleh informasi, pendidikan, serta layanan terkait kesiapan menikah. (Fatmariza, 2019).

Istilah efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective*, yang memiliki makna berhasil atau sesuatu yang memberikan hasil. Yang menghasilkan hasil yang diinginkan. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat kecocokan dalam penerapan, kegunaan, atau kontribusinya terhadap tercapainya tujuan. Secara luas, efektivitas merujuk pada keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diharapkan dengan hasil yang sesuai dengan yang dicapai (Efendi, 2024). Untuk mengukur Menurut Riant Nugroho dalam (Rahmatilah et al., 2021), konsep efektivitas kebijakan dapat diukur melalui lima aspek utama, yaitu 1) Tepat Kebijakan, 2) Tepat Pelaksana, 3) Tepat Target, 4) Tepat Lingkup, dan 5) Tepat Proses.

Tabel 2 Total Kelompok PIK-R di Wilayah Kabupaten Sidoarjo

NO	WILAYAH KECAMATAN	TOTAL DESA	TOTAL PIK-R		
			2021	2022	2023
1.	Tarik	20	3	7	7
2.	Prambon	20	0	0	0
3.	Kremlung	19	7	7	7
4.	Porong	15	0	4	4
5.	Jabon	13	1	1	4
6.	Tanggulangun	19	1	2	3
7.	Candi	24	3	5	6
8.	Sidoarjo	24	9	9	10
9.	Tulangan	22	5	6	6
10.	Wonoayu	23	9	9	17
11.	Krian	22	6	6	6
12.	Balombendo	20	5	5	5
13.	Taman	24	5	5	5
14.	Sukodono	19	4	4	4
14.	Buduran	15	2	3	3
16.	Gedangan	15	2	2	2
17.	Sedati	16	3	3	3
18.	Waru	17	5	7	7
TOTAL		347	70	85	99

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023.

Berdasarkan informasi yang tercantum di atas, diketahui bahwa total desa yang terdapat di wilayah Kabupaten Sidoarjo berjumlah 347. Sementara itu, total keseluruhan kelompok PIK-R hingga tahun 2023 masih 99 kelompok dari 304 kelompok. jika dilihat pada tabel terdapat satu yaitu Kecamatan Prambon yang sampai pada 2021-2023 tidak mempunyai kelompok PIK-R. Dengan demikian, terdapat 93 desa yang masih belum mempunyai komunitas PIK-R Dan ada beberapa kecamatan yang program PIK-R sudah tidak aktif atau tidak berjalan tetapi masih ada namanya program PIK-R. Penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya, seperti penelitian Mirna Abubakar, Joorie Marhaen Ruru, dan Very Yohanis Londa. di Manado yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai efektivitas program konseling remaja. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana studi sebelumnya mengevaluasi efektivitas program di Manado, sedangkan penelitian ini menilai peran PIK-R dalam menurunkan angka pernikahan dini di Sidoarjo. (ABUBAKAR, 2020). Kedua, Penelitian Rachmat Ramdani dkk. (2023) tentang pencegahan pernikahan dini melalui Program PIK-R di Karawang menunjukkan bahwa program ini belum efektif akibat kurangnya dukungan fasilitas dan infrastruktur. Studi Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif, serupa dengan penelitian sebelumnya, namun berbeda dalam penerapan teori. Penelitian sebelumnya mengacu pada teori keberhasilan Sutrisno (2007), sementara penelitian ini menggunakan teori Riant Nugroho dalam studi Rahmatilah et al. (2021). (Distinarista, 2023). Ketiga, Penelitian oleh Yoga Tri Nugrohi, Rumita Ena Sari, dan Arnild Augina Meckarische membahas pencegahan pernikahan dini melalui PIK-R di Karawang dengan pendekatan kualitatif. Kendala yang dihadapi serupa dengan penelitian sebelumnya, seperti kurangnya sarana dan prasarana, namun berbeda lokasi, yakni di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Kabupaten Sidoarjo. (Nugroho, 2021)

Berdasarkan hasil observasi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan yang terjadi yang banyak ditemui termasuk Kurangnya pemahaman remaja terhadap program PIK-R disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pertama, sosialisasi yang hanya dilakukan 2-4 kali dalam setahun tergantung anggaran, Kedua rendahnya partisipasi remaja atau SDM karena menganggap materi yang disampaikan Tidak terlalu penting, Ketiga serta kurangnya akomodasi dalam sosialisasi dan pembinaan yang tidak mencakup seluruh sasaran. Keempat Selain itu, koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan untuk mencegah pernikahan dini masih berjalan secara terpisah, dan Kelima tidak adanya ruang khusus untuk sekretariat juga menjadi kendala.

II Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menjelaskan capaian keberhasilan program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Studi ini dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terkait pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Instansi yang menangani pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta program keluarga berencana di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Dinas Lembaga yang menangani urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta program keluarga berencana di Kabupaten Sidoarjo adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Kajian ini berfokus pada evaluasi tingkat efektivitas program tersebut. Program Pusat Layanan dan Konsultasi untuk Remaja mengurangi angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Evaluasi efektivitas program ini didasarkan pada teori efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Riant Nugroho dalam penelitian Rahmatilah et al. (2021), yang mencakup lima aspek utama, yaitu: 1) Tepat Kebijakan, 2) Tepat Pelaksana, 3) Tepat Sasaran, 4) Tepat Lingkungan, Dan 5) Tepat Proses. Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari data primer, yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan responden, serta data sekunder yang berasal dari jurnal, penelitian sebelumnya, buku referensi, dokumen, dan arsip yang relevan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang berarti pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan relevansi dan kedalaman informasi yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, narasumber yang terlibat meliputi pimpinan Bidang Keluarga Berencana, Duta Genre Program PIK-R, Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Sidoarjo, serta remaja dan masyarakat umum. Mereka turut serta dalam Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga langkah utama: 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi Data, dan 3) Penyajian Data.

III Hasil dan Pembahasan

Hasil studi mengenai efektivitas program Pusat Layanan Bimbingan Remaja dalam menekan risiko pernikahan dini di Kabupaten Sidoarjo disajikan secara deskriptif. Efektivitas diukur berdasarkan teori kebijakan oleh Riant Nugroho dalam penelitian Rahmatilah et al. (2021), yang mencakup lima aspek utama, yaitu: 1) Tepat Kebijakan, 2) Tepat Pelaksana, 3) Tepat Sasaran, 4) Tepat Lingkungan, Dan 5) Tepat Proses.

A. Tepat Kebijakan

Menurut Riant Nugroho (Nugroho, 2020), kebijakan yang tepat adalah sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu menyasar dan menyelesaikan permasalahan yang ingin diatasi. Aspek Yang Kedua, dari sisi kebijakan dilihat apakah aturan tersebut sudah dirancang. Dengan mempertimbangkan karakteristik permasalahan yang ada. Aspek ketiga, kebijakan harus dirancang serta dikeluarkan dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan sifat kebijakan tersebut.

DP3AKB Kabupaten Sidoarjo telah mendirikan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) di sekolah dan komunitas sejak 2013 untuk mencegah pernikahan dini. PIK-R di sekolah memiliki cakupan lebih luas dibandingkan yang berbasis masyarakat. Namun, sosialisasi masih terbatas hanya 2-4 kali setahun akibat keterbatasan anggaran. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Heri Djadmiko Selaku Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo yang menangani program Keluarga Berencana, sebagai berikut :

“Anggaran bukan kendala utama, namun tetap menjadi faktor penting. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti BPKBD, Sub-BPKBD, OPD terkait, petugas desa, dan mitra lainnya, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan momen tertentu, seperti posyandu atau kegiatan lain yang relevan, tanpa harus membuat acara khusus. Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan universitas dan lembaga swasta untuk memperluas jangkauan informasi.” (wawancara 6 Januari 2025).

Hal berbeda diungkap dengan hasil wawancara bersama salah satu remaja di Kabupaten Sidoarjo, Sebagai berikut :

“ Jika sosialisasi dilakukan secara rutin mbak yaa kita dapet ilmu yang bermanfaat, jika jarang sosialisasi maka kita sebagai remaja juga gak tau apa apa mengenai apasih sih itu PIK-R dan materi disampaikan juga tidak tau materi tentang apa saja jika sosialisasi Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga jarang dilakukan kedepannya kita sebagai remaja sedikit keberatan jika ada sosialisai tersebut.” (wawancara 7 Januari 2025).

Sementara hasil wawancara Bapak Regi Selaku Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sidoarjo Sebagai berikut :

“Sejauh ini kita selalu mengadakan sosialisasi terkait kes pro, kesehatan reproduksi, pernikahan dini melalui PIK-R, bisa melalui kader-kader BPKBD yang dibawahnya ada kelompok kegiatan salah satunya Bina Kelompok Remaja. PIK-R di Kecamatan Sidoarjo dibagi mejadi 2 kelompok yaitu sekolah dan masyarakat, kalau berbasis Kecamatan itu berada di Kelurahan Celep, itu kita lakukan satu bulan sekali, tetapi kalau berbasis sekolah itu pasif, karena memang kesulitan kita semenjak covid sudah terputus. untuk meningkatkan

frekuensi kegiatan agar pemahaman remaja lebih optimal ada tentunya isu pernikahan dini itu kan lagi gencar yaa terkait edukasi pendidikan seks soal pranika itu lagi rame, kita sebagai penyuluh kegiatan harus lebih giat lagi mengingat ini sangat penting dengan cara kira rajin memberikan sosialisasi kemasyarakat, jadi walaupun kita keterbatasan personil, permasalahan keterbatasan anggaran itu pasti yaa mbak, tetapi kita tidak bisa berhenti begitu saja, kita harus bisa program harus tetap berjalan walaupun ada keterbatasan dana, misalnya setiap kegiatan kita mengadakan miniloka, dikegiatan miniloka itu kita sisipkan materi-materi tentang kesehatan reproduksi, pentingnya pendewasaan usia perkawinan, agar para remaja itu sadar untuk masa depannya. upaya untuk berkolaborasi dengan pihak lain sebenarnya kepingin sih mbak tapi masih belum ada tapi untuk sementara anggarannya baru swadaya aja atau kalau ada ifen tertentu saja mbak.” (wawancara 28 Februari 2025).

Pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini melalui PIK-R di Kabupaten Sidoarjo belum optimal. DP3AKB berupaya menyediakan wadah bagi remaja, namun terbatasnya sosialisasi akibat kendala anggaran menjadi tantangan utama. Sosialisasi hanya dilakukan beberapa kali dalam setahun, sehingga kurang efektif. Menurut Bapak Regi, Penyuluh KB Kecamatan Sidoarjo, sosialisasi dilakukan melalui kader BPKBD dengan pendekatan masyarakat dan sekolah. Di masyarakat, khususnya Kelurahan Celep, sosialisasi rutin berlangsung setiap bulan, sementara di sekolah masih pasif sejak pandemi. Penyuluh berusaha meningkatkan frekuensi dengan memanfaatkan kegiatan seperti miniloka. Namun, keterbatasan anggaran dan minimnya kolaborasi tetap menjadi kendala utama.

Penelitian ini sejalan dengan hasil-hasil studi sebelumnya, salah satunya penelitian oleh Dina Murdani pada tahun 2019 berjudul “Permasalahan Pusat Informasi dan Konseling Remaja Dalam Mencegah Pernikahan Dini.” Penelitian tersebut memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan dalam penelitian itu menunjukkan hal yang serupa. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan kurangnya anggaran pada program. Persamaan yang terdapat pada peneliti sebelumnya yakni meneliti tentang program PIK-R untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini berjudul permasalahan, sedangkan penelitian saat ini memakai teori Efektivitas. (Murdani, 2019).

B. Tepat Pelaksana

Menurut Riant Nugroho (Nugroho, 2020), Pelaksanaan kebijakan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta. Dalam program PIK-R, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan BPKBD, IMD, pemerintah desa, dan puskesmas. Perguruan tinggi juga dapat berkontribusi. Tenaga ahli diperlukan untuk edukasi pencegahan pernikahan dini, mencakup kebugaran reproduksi, perencanaan hidup, dan dampak pernikahan usia muda.

Namun adanya kendala yang dihadapi yaitu Rendahnya Partisipasi Remaja Atau SDM Karena Menganggap Materi Yang Disampaikan Tidak Terlalu Penting Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Heri Djadmiko Selaku Kabid Keluarga Berencana Dinas yang bertanggung jawab atas Pemberdayaan Berencana (DP3AKB) Di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai berikut :

“Biasanya, kami menyebar kuisioner setelah memberikan materi dan umpan balik. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan berbobot dan menarik, serta bagaimana cara penyampaian. Dari situ, kami bisa mengevaluasi lebih lanjut. Sebagai contoh, ketika kami mengadakan lomba PIK-R atau Genre, kami dapat melihat antusiasme peserta. Tahun ini, kami mengadakan lomba PIK-R Genre untuk melihat minat dari desa, kelurahan, dan sekolah, serta untuk memperbarui inovasi materi. Jika memungkinkan, materi yang kami sampaikan disesuaikan dengan isu-isu terkini. Misalnya, topik apa yang sedang relevan saat ini dan bagaimana kami dapat menghubungkannya. Hal ini bertujuan agar peserta Mempermudah pemahaman dan penerapan materi yang kami berikan. Selain itu, dengan adanya kementerian baru, kami juga memperhatikan lima prioritas utama mereka. Jika PIK-R tidak termasuk dalam prioritas tersebut, maka kami harus mencari cara agar program ini tetap relevan. Kami terus melakukan pendekatan interaktif, yaitu dengan "jemput bola". Artinya, kami tidak hanya menunggu anak-anak muda untuk bergabung, tetapi aktif menjangkau mereka agar lebih tertarik dan mau ikut dalam program PIK-R” (wawancara 6 Januari 2025).

Hal berbeda diungkap dengan hasil wawancara bersama salah satu remaja di kabupaten sidoarjo :

“Bahwa kegiatan sosialisasi itu materi sangat diperhatikan dalam sosialisasi karena penting sekali membahas pernikahan dini karena hal ini memiliki risiko besar, terutama jika tidak memahami dampaknya secara menyeluruh. Saat menyampaikan materi, sebaiknya diselipkan momen bercanda agar suasana lebih santai dan tidak tegang ataupun mengantuk, dengan itu pendengar tidak merasa bosan. Program PIK-R sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang minim informasi, karena membantu mengubah hal yang sebelumnya tidak tau menjadi lebih tau. ” (wawancara 7 Januari 2025).

Sementara hasil wawancara Bapak Regi Selaku Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sidoarjo Sebagai berikut :

“Cara memastikan pelaksanaan program tidak jangka pendek yaa mbak harus jangka panjang, harapan kita angka usia perkawinan dini di Kecamatan Sidoarjo ini berkurang, dan angka perceraian akibat pernikahan dini ini berkurang seperti itu, untuk memastikannya yaa pemahaman edukasih itu sampai ke sekolah sehingga mereka akan faham pentingnya perencanaan masa depan bagi remaja. Untuk sementara pelatihan bagi pendamping tidak ada yaa mbak karena biasanya kita membina pelatihan itu mendapatkan informasi dari

dinas dulu yaa, dinas menyampaikan Kecamatan untuk menghadirkan balik lagi yaa mbak keterbatas anggaran. Dengan diadakannya PIK-R itu sebenarnya kayak dinas itu mengadakan yang namanya duta Genre, diharapkan ada disetiap sekolah, sehingga duta Genre ini sebagai motivasi teman sabayanya untuk menginformasikan usia perkawinan dan perencanaan masa depannya.” (wawancara 28 Februari 2025).

Indikator Tepat pelaksanaan belum optimal karena rendahnya partisipasi remaja yang menganggap materi kurang penting. Meskipun Dinas terkait telah melakukan evaluasi, menyesuaikan materi dengan isu terkini, dan menerapkan pendekatan "jemput bola," keterlibatan remaja masih rendah. Faktor lain yang memengaruhi efektivitas sosialisasi adalah metode penyampaian yang kurang menarik. Remaja menyarankan agar materi disampaikan secara lebih santai, interaktif, dan diselingi humor. Menurut Bapak Regi, Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sidoarjo, edukasi harus menjangkau sekolah agar remaja memahami pentingnya perencanaan masa depan guna menekan angka pernikahan dini dan perceraian. Kendala utama saat ini adalah terbatasnya anggaran untuk pelatihan pendamping. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program PIK-R dan pembentukan Duta Genre di sekolah sebagai motivator sebaya. Namun, partisipasi remaja masih rendah karena materi dianggap kurang variatif dan membosankan, sehingga tidak mencapai target peserta sosialisasi.

Temuan penelitian ini selaras dengan hasil studi sebelumnya. Endah Wahyuningsih dan Siti Rustiyah (2021) yang membahas PIK-R dalam meningkatkan kualitas remaja. Keduanya menggunakan metode kualitatif dan menyoroti kurangnya minat remaja karena kegiatan yang monoton. Perbedaannya Berlokasi di tempat penelitian, dengan studi sebelumnya yang dilakukan di Desa Brangkal, Jombang, sementara penelitian ini dilakukan di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo. (Wahyuningsih & Rustiyah, 2021).

C. Tepat Target

Menurut Riant Nugroho (2020), guna mencapai keberhasilan, diperlukan kecocokan antara sasaran dengan tujuan yang telah disusun, serta memastikan bahwa sasaran berada dalam keadaan siap untuk mendapatkan intervensi dan dalam situasi yang mendukung. Oleh sebab itu, dalam menjalankan Program Generasi Berencana, penting untuk memastikan bahwa sasaran yang dituju sesuai dengan perencanaan awal. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) adalah keterbatasan jangkauan sosialisasi yang tidak dapat menyentuh seluruh sasaran. Hal ini menyebabkan informasi yang disampaikan hanya diterima oleh sebagian kecil remaja. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Heri Djadmiko Sebagai Kepala Bidang Keluarga Berencana di Dinas yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Serta Keluarga Berencana (DP3AKB) Di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai berikut :

“Kami melakukan evaluasi dan monitoring untuk memperoleh data mengenai remaja yang menjadi sasaran PIK-R. Data ini mencakup jumlah total remaja yang menjadi target serta jumlah yang telah menerima sosialisasi. Jika cakupan sosialisasi rendah, misalnya dari 100 remaja hanya 10 orang (10%) yang tersosialisasi, maka diperlukan upaya peningkatan, termasuk mengajukan anggaran tambahan melalui kerja sama dengan instansi terkait. Mekanisme yang kami miliki mencakup penganggaran, pengumpulan data, dan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang juga menangani isu-isu remaja. Proses ini melibatkan survei untuk mengidentifikasi kendala, seperti kurangnya data yang akurat atau kelemahan dalam pelaksanaan program. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data tersebut, kami dapat memahami kekurangan dan meningkatkan efektivitas program, termasuk melalui penyusunan presentasi data untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik” (wawancara 6 Januari 2025).

Hal berbeda diungkap dengan hasil wawancara bersama salah satu remaja di kabupaten sidoarjo Sebagai berikut :

“Sekarang kan sudah modern yaa mbk mungkin bisa memberikan atau membuat video tentang edukasi mengenai PIK-R ini entah itu masalah terkait pernikahan dini bisa lewat sosial media, gunakan sosial media yang ada untuk dimanfaatkan sebagai sarana yang bermanfaat seperti youtube, instagram, tik-tok dll, Dengan memaparkan materi yang menarik dan berkesan bagi remaja. satukanlah kalimat tersebut” (wawancara 7 Januari 2025).

Sementara hasil wawancara Bapak Regi Selaku Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sidoarjo Sebagai berikut :

“Sebenarnya kita ada evaluasi ya mbak kayak kemarin itu ada edukasi remaja jadi kayak ada pemahaman remaja terkait usia pernikahan dini dll itu dari BKKBN itu ada, yang sudah mengikuti yang belum berapa disetiap masing-masing, yang bisa mengetahui data itu hanya kabupaten saja per kecamatan. kita juga memastikan bahwa seluruh kelompok sasaran yaa berkurangnya angka pernikahan dini, untuk sementara informasi dari kader, kami setiap bulan itu ada pelaporan pernikahan usia pendewasaan usia perkawinan, itu ada kelompok usianya dibawah 20 nantik ada kategorinya, dikatakan berhasil jika data tersebut berkurang, mungkin nantik bisa dilihat dari data dari bulan per bulan angka pernikahan dininya mengingkat atau tidak kalau menurut saya cukup baik sih. untuk memperluas jangkauan sosialisasi Ada, tapi saya kembali lagi terhadap kemampuan kami, kami ada 3 penyuluh dengan pekerjaan kita yang cukup padat, sebenarnya niat baik itu sangat ada ya mbak, ya semoga dalam satu tahun ini kita membuat reflet untuk kesehatan remaja dan reproduksi.” (wawancara 28 Februari 2025).

Indikator Tepat Target Belum Optimal disebabkan oleh cakupan sosialisasi program PIK-R di Kabupaten Sidoarjo yang masih rendah. Hanya sebagian kecil remaja yang menerima informasi akibat keterbatasan data akurat dan sumber daya. Saran dari remaja adalah yaitu menggunakan platform media sosial seperti YouTube, Instagram,

dan TikTok. untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi. Sementara itu, Bapak Regi selaku Penyuluh KB Kecamatan Sidoarjo menyebutkan bahwa evaluasi dilakukan melalui pelaporan pernikahan dini setiap bulan. Kendala utama adalah keterbatasan personil (hanya tiga penyuluh), namun mereka tetap berkomitmen meningkatkan edukasi remaja dan berencana mengadakan refleksi tahunan tentang kesehatan reproduksi.

Penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya oleh Penelitian oleh Mutia Lestari Noor dan Astri Dwi Andriani (2020) membahas keterlibatan remaja dalam Program Kampung KB di Cianjur. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data berdasarkan model Miles dan Huberman. Perbedaannya, penelitian sebelumnya menyoroti kontribusi remaja dalam Kampung KB, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas PIK-R dalam menurunkan angka pernikahan dini di Sidoarjo. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu, dukungan keuangan, jumlah Pembina PIK-R, serta kurangnya pemantauan dan evaluasi rutin (Noor & Andriani, 2020).

D. Tepat Lingkungan

Menurut Riant Nugroho, Dua aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap ketepatan konteks adalah lingkungan regulasi dan faktor eksternal kebijakan. Lingkungan regulasi mencakup hubungan antara pembuat aturan, pelaksana kebijakan, dan pemerintah daerah. Sementara itu, lingkungan eksternal mencerminkan persepsi masyarakat terhadap Inisiatif Generasi Berencana, termasuk komunitas sebagai sasaran program.

Berdasarkan hasil studi sudah dilakukan Salah satu kendala pada program PIK-R terkendala Akomodasi dan Infrastruktur. Program PIK-R sering terkendala oleh keterbatasan akomodasi dan infrastruktur, termasuk ketiadaan tempat yang layak untuk melaksanakan kegiatan. Kendala ini dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program dan mengurangi partisipasi remaja dalam kegiatan sosialisasi. Sebagaimana diungkapkan Bapak Heri Djadmiko selaku Kabid Program Keluarga Berencana yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Sebagai berikut :

“Kami dapat mencari perusahaan yang bersedia membantu dalam penganggaran untuk sosialisasi PIK-R, serta bekerja sama dengan universitas dan sekolah. Sebagai contoh, kami bisa diundang sebagai narasumber dalam acara penerimaan siswa baru di sekolah, sehingga dapat memberikan edukasi langsung kepada remaja. Intinya, kami akan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk keterbatasan tempat, tidak menjadi masalah karena sosialisasi bisa dilakukan di kantor atau lokasi lain yang tersedia, sehingga fasilitas bukan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan” (wawancara 6 Januari 2025).

Hal yang sama diungkap dengan hasil wawancara bersama salah satu remaja di kabupaten sidoarjo Sebagai berikut :

“Tidak ada sih mbak selama saya mengikuti didesa ataupun disekolah kalau masalah tempat sih tidak jadi masalah dan tempatnya juga nyaman dan strategis, yang terpenting materi yang disampaikan tidak membosankan dan materi bisa diterima oleh remaja.” (wawancara 7 Januari 2025).

Hal berbeda diungkap dengan hasil wawancara Bapak Regi selaku Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sidoarjo Sebagai berikut :

“Sarana dan prasarana kita belum memadai yaa mbak sehingga itu yang menjadi kendala terus kemudian selain kekurangan tenaga kita juga membutuhkan kader untuk turun kebawah tidak semua kader itu memahami akan pentingnya kesehatan reproduksi, pernikahan dinisehinga mengingat usia kader kami itu rata-rata sudah lansia, itulah yang menjadi hambatan diterima remaja itu kurang maksimal. Kita bekerja sama di wilayah Kecamatan Sidoarjo ini ada 9 sekolah 4 SMP, 4 SMA, dan satu universitas, sebenarnya ada tapi belum saja mbak, jadi belum sampai kearah sana hanya sebatas sosialisasi saja mbak, karena kesekolah - sekolah kita juga butuh anggaran terus butuh sarana dan prasarana yang memadai selagi semua belum siap kita hanya sosialisasi saja mbak dan Siswa atau remaja yang diberi sosialisai harus faham akan materi terkait usia perkawinan dini.” (wawancara 28 Februari 2025).

Indikator Tepat Lingkungan belum optimal. Menurut Bapak Heri Djadmiko, Kabid Keluarga Berencana Dinas di Sidoarjo, tempat bukan kendala dalam sosialisasi PIK-R karena bisa dilakukan di berbagai lokasi. Remaja pun menganggap materi yang menarik lebih penting daripada tempat. Namun, menurut Bapak Regi, Penyuluh KB Kecamatan Sidoarjo, keterbatasan sarana, prasarana, serta kurangnya tenaga penyuluh dan kader yang memahami kesehatan reproduksi menjadi hambatan dalam sosialisasi.

Penelitian ini konsisten dengan studi sebelumnya oleh Mochamad Dohan (2020) di Universitas Negeri Surabaya tentang Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kelurahan Mentikan, Kota Mojokerto. Keduanya memakai metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis Miles dan Huberman, meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Perbedaan terdapat pada lokasi pelaksanaan, di mana penelitian ini dilakukan di kantor DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, sementara penelitian sebelumnya berfokus di Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto. (Andriani, 2020)

E. Tepat Proses

Riant Nugroho (2020) menjelaskan Terdapat tiga langkah yang harus dilalui dalam pelaksanaan kebijakan publik, yaitu: Policy acceptance, yang mengacu pada pandangan pemerintah bahwa kebijakan tersebut adalah penerimaan kebijakan, yaitu saat pemerintah menetapkan kebijakan sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan; dan strategic readiness, yaitu kesiapan masyarakat untuk melaksanakan atau terlibat dalam kebijakan tersebut. Sementara itu.

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan, Salah satu kendala pada program PIK-R terkendala Koordinasi Antar Program yang Terpisah dan Tidak Ada Ruang Sekretariat. Koordinasi dan sinkronisasi antar program kegiatan yang berjalan secara terpisah menjadi hambatan dalam menciptakan kerjasama yang solid antara pihak yang terlibat. Tidak adanya ruang khusus untuk sekretariat juga menjadi masalah dalam manajemen administrasi dan Pelaksanaan aktivitas yang terstruktur, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Heri Djadmiko Selaku Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana bagian dari program Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Sebagai berikut :

“PIK-R mengelola koordinasi antar program yang berjalan terpisah agar dapat bekerja secara lebih terintegrasi dengan Rapat-rapat tukar informasi, baik yang bersifat informal maupun formal, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang ada. Dengan demikian, kita dapat mencari solusi yang tepat dan mengetahui rekomendasi kegiatan yang dapat terus berjalan dan berkembang. Namun, seringkali materi yang disampaikan hanya berkisar pada Perkara yang tetap terjadi setiap tahun. , tanpa adanya pembaruan informasi. Untuk itu, penting bagi kita untuk terus memperbarui dan mengembangkan materi serta kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh, dengan adanya duta genre, pengerjaannya dapat dilakukan di rumah dan hasilnya dikumpulkan di kantor. Dan kita mempunyai rencana untuk menciptakan ruang sekretariat atau fasilitas lain yang dapat mendukung kelancaran operasional PIK-R biar lebih terarah dan biar mempunyai ruangan sendiri” (wawancara 6 Januari 2025).

Hal berbeda diungkap dengan hasil wawancara Bapak Regi Selaku Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Sidoarjo Sebagai berikut :

“Sebenarnya antara pemegang instusi pendidikan itu kita datang mengkoordinasi bagaimana merumuskan suatu permasalahan ini yang ada di permasalahan remaja itu dapat teratasi, itu yang menjadi PR kita kedepannya untuk lebih koordinasi dengan pihak lain, untuk sementara belum ada ruang sekretariat, karena untuk sarana dan prasarana kita masih kurang yaa kalau dilevel kecamatan, mungkin dari dinas ada ya dulu didinas ada tempat menurut saya sudah karena ada pemekaran didinas ada 2 gedung dan dulu ada ruang sekretariat sekarang menjadi ruang kerja sekarang, kalau untuk dikecamatan tidak ada untuk penyuluhnya tidak ada balai, karena keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo sehingga, hanya ada 4 Kecamatan di Kabuaten Sidoarjo ini yang hanya memiliki ruang sekretariat untuk konsul. untuk mengatasi hambatan kita sering koordinasi ya mbak, untuk koordinasi antar Kecamatan ini sudah putus ya mbak karena keterbatasan personil dan pekerjaan yang sangat padat sehigga terkait PIK-R itu sedikit belum kita seriusin hanya sebatas sosialisasi dan sosialisasi berupa harapannya melalui kader kader ya mbak.” (wawancara 28 Februari 2025).

Indikator Tepat Proses belum optimal karena laporan masih disatukan dengan agenda rapat. PIK-R berperan dalam mengoordinasikan program agar lebih terintegrasi melalui rapat tukar informasi. Namun, materi yang disampaikan kurang diperbarui. Dinas berencana menciptakan ruang sekretariat untuk mendukung operasional PIK-R. Menurut Bapak Regi. Penyuluh KB Kecamatan Sidoarjo, kendala utama adalah kurangnya sarana, terutama ruang sekretariat, serta koordinasi yang belum optimal karena keterbatasan personil dan beban kerja. Akibatnya, program PIK-R lebih banyak bersifat sosialisasi tanpa pendampingan lebih lanjut.

Penelitian ini konsisten dengan studi Racchmat Ramdani dkk. (2023) di Karawang, yang menunjukkan bahwa PIK-R belum efektif akibat kurangnya dukungan fasilitas. Persamaannya terletak pada metode kualitatif, sementara perbedaannya ada pada teori yang digunakan. Studi sebelumnya mengacu pada Hardani dkk. (2017), sedangkan penelitian ini menggunakan konsep efektivitas organisasi Riant Nugroho dalam penelitian Rahmatilah et al. (2021). (Dohan, 2020).

III Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam mengatasi masalah pernikahan dini di Kabupaten Sidoarjo belum optimal. Hal ini tercermin dari lima indikator utama. Tepat Kebijakan Belum Optimal karena keterbatasan anggaran yang membatasi frekuensi sosialisasi. Sosialisasi lebih aktif di masyarakat dibandingkan sekolah, yang masih pasif sejak pandemi. Tepat Pelaksana belum Optimal akibat rendahnya partisipasi remaja karena materi yang kurang menarik dan minimnya pelatihan bagi pendamping. Tepat Target belum Optimal bkarena cakupan sosialisasi yang terbatas akibat kurangnya data akurat dan keterbatasan personel. Pemanfaatan media sosial direkomendasikan untuk meningkatkan daya tarik. Tepat Lingkungan Belum Optimal sepenuhnya karena perbedaan persepsi mengenai ketersediaan fasilitas dan tenaga penyuluh di tingkat dinas dan kecamatan. Tepat Proses masih Belum Optimal memerlukan perbaikan dalam koordinasi antarprogram, pembaruan materi, serta fasilitas sekretariat PIK-R yang terbatas. Secara keseluruhan, tantangan utama program ini meliputi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, metode penyampaian informasi, dan jangkauan sosialisasi. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengatasi kendala tersebut guna meningkatkan efektivitas program dalam mencegah pernikahan dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Pusat Informasi Dan Konseling Remaja PIK-R Untuk Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini Di Kabupaten Sidoarjo.” Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Bapak Heri Djadmiko Selaku Kabid Keluarga berencana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Nasional (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo atas dukungan data serta informasi yang relevan. Penulis juga berterima kasih kepada para informan yang telah meluangkan waktu untuk wawancara mendalam, serta semua pihak yang terlibat dalam penyediaan dokumen dan laporan yang mendukung penelitian ini khususnya bapak Regi Selaku Penyuluh KB di Kecamatan Sidoarjo dan Remaja. Penghargaan juga disampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas bimbingan akademik dan fasilitas penelitian yang diberikan. Dan yang paling penting penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Dimas Nur Arif selaku dosen pembimbing yang sudah membimbing dan memberikan masukan dalam proses Tugas Akhir hingga selesai. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi upaya percepatan penurunan angka pernikahan dini di Kabupaten Sidoarjo dan menjadi referensi bagi penelitian di masa mendatang.

REFERENSI

- [1] ABUBAKAR, D. (2020). Efektivitas Program Konseling Remaja Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94), 1–7.
- [2] Aldy Wijayanto, D. (2019). STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PIK-R PUTRA MANDIRI DALAM UPAYA MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BLORA Aldy. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- [3] Amirah Syuaib, D. (2024). *Optimalisasi Pengasuhan Anak dan Pencegahan Pernikahan Dini melalui Penerapan Fungsi Keluarga pada Bina Keluarga Remaja (BKR) Desa Cimande, Kabupaten Bogor, Jawa Barat*. 2(4), 435–442.
- [4] Andi Dadi Mashuri Makmur, D. (2024). *Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Sosial, Hukum dan Kesehatan di Kabupaten Wajo*. 1(2), 30–38.
- [5] Andriani, D. (2020). Peran Remaja Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Barukupa Kabupaten Cianjur. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 6(1), 399–412.
- [6] Distinarista, D. (2023). Pencegahan pernikahan dini sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di Desa Kalirejo. *Community Empowerment Journal*, 1(4), 185–192. <https://doi.org/10.61251/cej.v1i4.34>
- [7] Dohan, M. (2020). Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (Studi Pada Kelompok BKR Mentikan II Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto). *Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 1–10.
- [8] Efendi, A. (2024). Efektivitas Program Area Traffic Control System (Atcs) Dalam Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung). *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 3(3), 61–70.
- [9] Fatmariza, E. (2019). Efektivitas Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Di SMAN 1 Selong Tahun Pelajaran 2019/2020. *JKP (Jurnal Konseling Pendidikan)*, 3(2), 73–89. <https://doi.org/10.29408/jkp.v3i2.2561>
- [10] HIBRIYAH, F. (2019). HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DAN KEMATANGAN EMOSI REMAJA DITINJAU DARI PENERIMAAN DIRI PADA ANAK BROKEN HOME DI GRESIK. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- [11] Inas, S. N. (2023). STUDI DESKRIPTIF KESIAPAN MENIKAH PADA PASANGAN ANAK PEMOHON DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- [12] Jatintimes.com. (2023). Pengadilan Agama Sidoarjo Terima 262 Permohonan Pernikahan Dini, 70 Persen Hamil Dulu. Diakses pada 11 September 2023. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- [13] Liana, I. (2018). Efektivitas Program Generasi Berencana Pusat Informasi Konseling (Pik) Remaja Bagi Siswa Sma Negeri Di Kota Banda Aceh. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 4(2), 15. <https://doi.org/10.29103/averrous.v4i2.1034>
- [14] Muhammad Jodi Setianto, D. (2022). Jurnal pacta sunt servanda, PERAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3 Nomor 2(September), 32–41.
- [15] Murdani, D. (2019). Permasalahan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Dini. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 5(8), 533–541.

- [16] Noor, M. L., & Andriani, A. D. (2020). PERAN REMAJA DALAM PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) BARUKUPA KABUPATEN CIANJUR. *Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 6(1), 399–411. www.journal.uniga.ac.id
- [17] Nugroho, D. (2021). Efektivitas Pusat Informasi Konseling Remaja (Pik-R); Studi Kualitatif Dengan Teknik Most Significant Change (Msc). *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan Terpadu*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.53579/jitkt.v1i1.8>
- [18] R. Slamet Santoso, D. (2019). Public Value Dalam Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Rembang. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- [19] Saputro, K. Z. (2018). Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(1), 25. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1362>
- [20] Sardi, B. (2016). Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.4(No.1), 194–207.
- [21] Wahyuningsih, E., & Rustiyah, S. (2021). Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Dalam Meningkatkan Kualitas Remaja. ... : *Jurnal Ilmu Sosial ...*, 1(1), 70–81.
- [22] War'iah. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) DI DESA PONDOK BABARIS KECAMATAN SUNGAI. 453–461.
- [23] Yuliani Catur Rini, D. (2022). Dinamika Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 13–26. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

